

OJO NJAWIL OJO NYADUK

HUBUNGAN SOSIAL BURUH DALAM KOMUNITI RUNGKUT LOR, SURABAYA

Maria Dona & Selly Riawanti¹

Abstract

One of the obsessions of recent labor movement is organizing the community-base labor movement. The study shows that labors have a not very lucky social identity in the community they live, in which it differ them from their lords. The identity is formed due to: (1) the social demographic character of the labor, (2) The working rhythm in factories which limits their time and energy to socialize themselves with their lords. Such unlucky differences are still strengthened by: (1) the regulation of inhabitant administration, (2) labor allocation by industries, and (3) various interventions towards communities. Establishing the community-base labor movement is supposed to consider such realities, in order not to strengthen the differences, but build up understanding among communities.

Kata kunci: buruh, komuniti, identitas, pengorganisasian buruh

Pendahuluan

"*Nek ora gelem dijawil ojo njawil, nek ora gelem dicaduk ojo nyaduk*" ("Jika tak ingin disinggung jangan menyinggung, jika tak mau ditendang, jangan menendang"). Ini adalah sebuah ung-

kapan umum yang dipahami oleh setiap buruh yang datang dan tinggal di Rungkut Lor (Rungkut Utara), yang menggambarkan sikap mereka dalam berhubungan dengan warga lain di tempat tinggalnya. Rungkut Lor adalah kawasan permukiman padat pen-

¹ Peneliti pada Yayasan AKATIGA

duduk yang terletak di sisi Selatan kawasan industri Surabaya yang terkenal dengan nama SIER (*Surabaya Industrial Estate Rungkut*). Kawasan industri yang dibangun tahun 1980 ini ramai dengan dinamika keluar-masuk buruh. Terutama sejak tahun 1997, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) 'merontokkan' sebagian besar buruh industri di kawasan ini karena relokasi ke kawasan industri Pasuruan (*PIER-Pasuruan Industrial Estate Rungkut*) atau mengubah status buruh yang dipekerjakan setelah ter-PHK menjadi pekerja dengan kontrak kerja waktu tertentu (KKWT). Mayoritas buruh tidak lagi memiliki kepastian jaminan kerja di pabrik karena kontrak kerja semakin 'lentur dan longgar', sedangkan pabrik bukan satu-satunya tempat kerja. Akibatnya, menjamurlah industri rumahan yang menjalankan produksi secara subkontrak sebagai akibat dari sistem desentralisasi proses produksi, karena di dalam komunitas kini tersedia buruh murah yang umumnya terdiri dari para korban PHK.

Salah satu perhatian para pengamat perburuhan di Indonesia adalah mengenai kehidupan buruh dalam komunitas. Perhatian ini menguat seiring dengan perubahan-perubahan besar yang terjadi dalam relasi industri, khususnya akibat-akibat krisis eko-

nomi sejak 1997 sebagaimana yang digambarkan sepintas dengan kasus Surabaya tadi. Gejala PHK yang melamparkan buruh keluar dari pabrik, atau penurunan status-status kerja berikut imbalannya, menimbulkan keprihatinan tentang hilang atau menurunnya tingkat kesejahteraan buruh dan mendorong gagasan tentang pengorganisasian buruh di luar tempat kerja atau pengorganisasian buruh berbasis komunitas, untuk menghadapi persoalan-persoalan mereka.

Gagasan mengorganisasi buruh melintas batas-batas tempat kerja sesungguhnya bukan baru muncul setelah krisis relasi industri. Munck misalnya, sejak 1980 telah mengemukakan konsep "kelas pekerja" yang merangkum para pekerja di dalam maupun di luar industri (petani, pengrajin, dll.). Konsep ini menurutnya dapat dijadikan landasan guna menggalang gerakan sosial demi perbaikan nasib para buruh dalam pengertian yang luas. Vedi Hadiz (2001) yang tekun mengamati perburuhan di Indonesia juga mengemukakan gagasan pengorganisasian buruh berbasis komunitas. Namun studi empirik tentang pengorganisasian buruh dalam komunitas, baik sebagai kemungkinan atau sebagai kenyataan, masih langka. Dalam kaitan ini perlu diperhatikan hubungan di antara buruh dengan

warga lain dalam komunitas di tempat tinggalnya. Resmi Setia dari AKATIGA yang meneliti strategi buruh di kawasan industri tekstil di Majalaya, Jawa Barat, dalam menanggulangi masalah-masalah kehidupan mereka, menemukan keanekaan cara buruh menyasiasi persoalan sehari-hari. Hal ini telah memunculkan keanekaan identitas buruh, yang dikhawatirkan akan menyulitkan pengorganisasian (2005:134-150).

Melanjutkan perhatian kepada kehidupan buruh dalam komunitas, pada bulan Juni-Juli 2005, AKATIGA melakukan penelitian di Rungkut Lor, Surabaya. Daerah ini dipilih berdasarkan dugaan bahwa keragaman identitas buruh dalam komunitas mungkin lebih rendah daripada di Majalaya, setidaknya dari latar etniknya. Di Majalaya, banyak buruh yang berasal dari luar Jawa Barat, termasuk dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara. Para pendatang ini lebih berkonsentrasi ke pekerjaan mereka, sehingga dalam kehidupan sehari-hari tidak terlalu terlibat dalam kegiatan komunitas di tempat mereka tinggal. Di Surabaya, diduga buruhnya kebanyakan berasal dari Jawa Timur, walaupun ada golongan etnik lain di sana mungkin orang Madura. Pengalaman Maria Dona dari studinya tentang Dewan Pengupahan (2004), juga dari

beberapa diskusi dengan jaringan pendamping buruh, mengesankan bahwa aktivisme buruh di sini lebih tinggi daripada di Majalaya. Berdasarkan pengetahuan semacam itu, para peneliti AKATIGA menduga bahwa keseragaman etnis dan aktivisme buruh di Surabaya akan membuka peluang lebih besar bagi pengorganisasian buruh dalam komunitas.

Penelitian dilakukan bersama beberapa aktivis dari suatu serikat buruh (SB) independen yang tinggal dan melakukan pengorganisasian buruh di komunitas Rungkut. Kegiatan pengorganisasian ini menanggapi kondisi basis buruh di pabrik yang semakin rentan dan berkurang jumlahnya, sedangkan korban PHK semakin meningkat. Pengorganisasian dilakukan dengan mengumpulkan pedagang kaki lima dan pekerja subkontrak rumahan menjadi kelompok yang mandiri dan kuat. Para aktivis ini percaya akan solidaritas antar 'rakyat pekerja'. Pengertian 'rakyat pekerja' ini meliputi para pekerja baik di sektor formal maupun informal, dan digunakan dengan asumsi memudahkan penggalangan solidaritas di antara mereka. Di Rungkut, mereka yang dianggap termasuk golongan ini adalah para buruh pabrik, pedagang kaki lima, dan pekerja subkontrak. Namun menerapkan sebuah konsep besar 'rak-

yat pekerja' pada suatu komuniti yang warganya memiliki beragam identitas, tidak hanya identitas 'pekerja', apalagi ada konotasi 'kelas bawah' dalam konsep 'rakyat pekerja' itu, tentu menimbulkan tantangan-tantangan tersendiri.

Tulisan ini mengupas tantangan bagi pengorganisasian buruh berbasis komuniti, berdasarkan hasil penelitian AKATIGA mengenai buruh dalam komuniti di Rungkut Lor. Terlebih dahulu akan diulas konsep-konsep pokok yang digunakan, yakni komuniti, kelas, organisasi, dan identitas. Selanjutnya adalah pemerian riwayat komuniti Rungkut Lor dalam kaitannya dengan perkembangan industri di kawasan ini. Bagian berikutnya melukiskan struktur sosial setempat serta tempat buruh di dalamnya. Bagian terakhir mengulas kemungkinan menggalang solidaritas antarwarga di komuniti untuk memperjuangkan kepentingan buruh.

Identitas, Komuniti, Kelas, Organisasi

Ada empat konsep sosiologis pokok yang akan dijelaskan dulu pengertiannya untuk membahas isu pengorganisasian buruh berbasis komuniti, yakni komuniti, kelas, organisasi, dan

identitas.

Identitas. Identitas adalah konsep diri seseorang atau segolongan orang, yang hanya muncul dalam interaksi atau hubungannya dengan orang atau golongan lainnya. Mengingat bahwa setiap orang akan berhubungan dengan banyak orang atau golongan dalam banyak konteks, maka identitasnya juga akan relatif beragam dan beragam pula sumbernya (Robbins, 1973; Castells, 1997). Identitas seseorang terjalin dari persepsinya dan persepsi orang lain mengenai ciri-ciri atau sifat-sifat orang itu yang membuatnya sama seperti atau tidak sama dengan orang lain (Goodenough, 1963). Ciri-ciri yang relevan ini meliputi berbagai dimensi seperti penampakan fisik, usia, jenis kelamin, nama pribadi, keanggotaan dalam suku bangsa, keterampilan atau keahlian, kedudukan atau kelas sosial, dan seterusnya. Biasanya dimensi identitas bersifat *bi-polar* (berkutub dua), seperti "kaya-miskin", "kurus-gemuk", dsb.

Pemunculan identitas akan berlaku secara selektif bergantung kepada kepentingan pelakunya (perorangan maupun kolektif) dan konteks interaksi yang dihadapinya. Berhubung identitas itu hanya muncul dalam interaksi, maka secara teoretik kemun-

culan identitas itu menyangkut dua pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang menyatakan identitas tertentu dan pihak lain yang mengakui (atau menolak) identitas tersebut. Untuk penelitian tentang buruh dalam komunitas, setidaknya ada dua sumber identitas yang penting bagi buruh yang bersangkutan, yakni: (1) kedudukannya sebagai pekerja, yang dalam hal ini menghadapkannya dengan pemberi kerja (baik di dalam maupun di luar komunitas) dan menyatukannya ke dalam golongan pekerja secara umum; dan (2) dari kedudukannya sebagai warga komunitas setempat (yang menyatukannya dengan sesama warga komunitas, dan menghadapkannya kepada pihak-pihak lain di luar komunitas ybs).

Penggalangan identitas penting bagi suatu upaya mengorganisasi. Ini berarti bahwa identitas dapat dibentuk dan dibangun berdasarkan berbagai bahan. M. Castells menunjukkan bahan-bahan pembentuk identitas sejarah, geografi, biologi, institusi produksi dan reproduksi, ingatan kolektif, khayalan atau bayangan pribadi, aparatus kekuasaan, dan keagamaan (1997:7).

Komunitas. Definisi konsep ini bermacam-macam, tetapi pada dasarnya ada dua golongan definisi: (1) melihat

komunitas sebagai suatu kesatuan sosial atau kolektivitas; dan (2) melihat komunitas sebagai hubungan-hubungan sosial atau sentimen kolektif. Dalam pengertian yang pertama, komunitas biasanya dianggap berupa: (1) suatu kelompok manusia yang tinggal bersama di suatu ruang fisik atau wilayah geografis seperti kelompok ketetanggaaan, dusun atau desa, kota, dan sebangsanya; (2) kelompok yang memiliki suatu ciri bersama tertentu, suatu perasaan kebersamaan, dan/atau memelihara ikatan-ikatan sosial serta interaksi di antara anggotanya sehingga membentuknya menjadi suatu satuan sosial seperti komunitas etnik, komunitas agama, komunitas akademik, atau komunitas profesional. Perbedaannya terletak pada pendekatan teritorial atau non-teritorial.

Beberapa ahli melihat bahwa wilayah bersama merupakan landasan penting bagi pembentukan komunitas. Sedangkan mereka yang menggunakan pendekatan non-teritorial melihat bahwa komunitas tidak harus terikat oleh kesamaan tempat tinggal, karena ada banyak sumber untuk menumbuhkembangkan ikatan demikian — kesamaan pengalaman (sejarah), kesamaan penganutan nilai, kesamaan kepentingan, hubungan kekerabatan, dll — yang tidak mensyaratkan tinggal bersama. Pendekatan non-teri-

torial ini menjadi semakin populer berkat kenyataan kemajuan teknologi komunikasi yang mereduksi nilai kedekatan teritorial sebagai landasan asosiasi manusia. M.M. Webber pernah mengemukakan konsep *community without propinquity* (komuniti tanpa kedekatan fisik); dan senada dengan pendekatan ini dapat disebutkan pula pendekatan jaringan sosial yang mengemukakan pentingnya perhatian kepada kolektivitas tanpa pengelompokan teritorial (a.l. Boissevain 1968).

Kelas. Kelas adalah konsep yang *ajeg* digunakan dalam gerakan perburuhan, juga sebuah konsep yang telah cukup tua sejarah perdebatannya di dalam ilmu-ilmu sosial. Secara umum kelas sosial merujuk ke suatu golongan penduduk yang (1) dibedakan dari golongan lainnya berdasarkan kekayaan serta status sosial yang terkait; (2) status tersebut terutama berpangkal dari kedudukan golongan tersebut dalam produksi dan distribusi kekayaan sosial; (3) memiliki kepentingan tersendiri yang bertentangan atau melengkapi kepentingan golongan lainnya; dan (4) karenanya memperlihatkan kecenderungan sikap dan tingkah laku — politik, budaya, dan sosial — yang 'khas' golongan yang bersangkutan. Awalnya memang konsep kelas mengandung arti

ekonomi, berkat pengaruh konsepsi David Ricardo yang mengidentifikasi golongan sosial pekerja dengan kategori ekonomi dari kerja, yang dilihat sebagai salah satu faktor bagi produksi. Prinsip ini dirujuk oleh Karl Marx yang konsep kelas pekerjaannya hingga kini masih populer dalam gerakan perburuhan. Sumbangan Marx yang penting adalah pandangannya bahwa kelas merupakan sumber utama bagi dinamika sosial, sehingga harus menjadi landasan bagi penafsiran tentang dinamika sosial. Sejarah umat manusia adalah sejarah pertentangan antarkelas; perubahan sosial terjadi melalui revolusi kelas; konflik antara majikan yang kapitalis dan pekerja yang berpangkal pada moda produksi kapitalis, akan mengarah ke revolusi proletar dan suatu tata produksi baru, yakni sosialis. Marx sangat yakin bahwa konsep ini memiliki nilai penjelasan dan prediksi yang tinggi (bd. Bauman, 1985; Ritzer & Goodman, 2004).

Bauman (1985) melihat kesuksesan konsep kelas dari Marx disebabkan oleh: (1) keselarasannya dengan pandangan liberal, yang menafsirkan tindakan individu sebagai upaya rasional untuk memenuhi kepentingannya, dan (2) dimensi peluang pengelolaan surplus sosial dalam perjuangan atau pertentangan antarkelas. Kelas yang

tersisih dari akses terhadap surplus dapat memperbaiki situasinya bukan dengan memiliki surplus tersebut, melainkan dengan mengupayakan perolehan hak untuk mengelolanya. Ini mengilhami kajian-kajian tentang pertentangan antara kelas majikan dan kelas pekerja, dan lebih mutakhir lagi, mengilhami gerakan untuk memajukan pekerja dari kedudukan sebagai sekedar faktor produksi kapitalis dengan membangun kesadaran tentang situasi mereka agar nantinya dapat menyusun strategi politik yang ditujukan untuk mengatasi pengungkungan kapital terhadap mereka dengan menghapuskan moda produksi kapitalis itu sendiri.

Memang ada kesenjangan antara kenyataan historis dengan teori kelas Marx: hingga dewasa ini, para buruh industri belum banyak melangkah maju ke arah yang diimpikan Marx sejak pertengahan abad ke-19 itu. Telah banyak pula sumbangan teori sosial untuk mengembangkan gagasan perjuangan kelas dari Marx itu. Di antara yang penting adalah konsep G. Lukacs tentang kesadaran kelas (1967 [1923]). Menurutnya, ada dua jenis kesadaran: (1) kesadaran dari kelas (*consciousness of class*) yang empirik yang didapat dari pengalaman hidup sehari-hari para anggota kelas yang bersangkutan, dan (2)

kesadaran akan kelas (*class consciousness*) yang lebih konseptual, yang timbul dari suatu pandangan yang berperspektif luas terhadap konstelasi kelas secara menyeluruh dalam suatu masyarakat. Kesadaran empirik tidak dengan sendirinya akan berubah ke kesadaran konseptual tadi. Informasi yang diperlukan untuk membangun kesadaran kelas tidak begitu saja dapat dipungut dari pengalaman sehari-hari para anggota kelas yang terkungkung oleh rutinitas kehidupan sehari-hari. Sebab itulah Lukacs menyebut kesadaran yang pertama sebagai "kesadaran palsu" (*false consciousness*); "palsu" karena dibatasi oleh sempitnya cakrawala pengalaman individu. Maka diperlukan bantuan analisis ilmiah tentang situasi kelas tersebut, untuk kemudian 'dicekokkan' ke alam pikiran para buruh melalui saluran organisasi-organisasi politik mereka. Jadi, Lukacs menganjurkan suatu perjuangan ideologis untuk mencapai perubahan yang memperbaiki kedudukan buruh. Begitulah, beberapa ahli sosiologi lain mengembangkan lagi gagasan ini, yang ujungnya adalah pemahaman bahwa kesadaran kelas itu bukan hal yang begitu saja ada pada setiap anggota kelas, melainkan sesuatu yang berproses.

Kita lihat bahwa teori kelas ala Marx menunjuk ekonomi sebagai variabel dominan — kalau pun bukan tunggal — untuk menjelaskan hubungan antar-kelas. Telah banyak kritik penting terhadap gagasan seperti ini, terutama berdasarkan kenyataan bahwa kehidupan sosial tidak hanya dikendalikan oleh ekonomi, tetapi juga oleh banyak hal lain. Untuk memahami kedudukan buruh dalam komunitas, konsep kelas memang harus diperluas pengertiannya dari sekedar suatu golongan ekonomi. Melihat buruh sebagai suatu kelas dalam relasi produksi belaka akan menyulitkan pemahaman mengenai posisi mereka dalam komunitas, meskipun status buruh sendiri sebagai status ekonomi tetap penting sebagai salah satu sumber identitas mereka. Untuk itu dapat dirujuk gagasan Max Weber bahwa kelas itu bersifat multidimensi (lih. Bauman, 1985; Ritzer & Goodman, 2004)

Bagi Max Weber, kelas memang bertolak dari hubungan ekonomi, tetapi bukan hanya itu. Ada dimensi sosial politik pula dalam konsep kelas. Perbedaan atau persamaan kedudukan ekonomi tidak dengan sendirinya menghasilkan perbedaan kepentingan. Kepentingan bisa beragam sesuai dengan keragaman barang dan peluang pasar. Misalnya, ada kelas

ekonomi yang hanya terkait pada suatu komoditas tertentu, seperti “kelas permukiman”, sehingga kepentingan kelasnya juga amat terbatas. Artinya bagaimana pentingnya kelas bagi seseorang, tidak dapat ditentukan secara *a priori*, tetapi harus dikaitkan dengan konteks pasar yang dihadapinya. Ini berarti pula bahwa kelas yang dalam pengertian Weber terutama merujuk ke pembedaan sosial, bisa beragam, dan bahkan bisa berubah-ubah. Oleh para ahli sosiologi Amerika Serikat, gagasan Weber itu dikembangkan menjadi konsep dan teori tentang ketidaksetaraan atau ketimpangan sosial, yang lebih bersifat gradual daripada dikotomis. Bagi mereka, perlu dikaji ada tidaknya korelasi di antara kekayaan, gengsi sosial (*prestige*) dan pengaruh atau kekuasaan. Dalam hal ini, konsep kelas diubah ke konsep stratifikasi (pelapisan) sosial.

Di antara ahli sosiologi yang menggunakan konsep stratifikasi sosial adalah Randall Collins (1975), terutama untuk menjelaskan konflik. Menurutnya, stratifikasi sosial itu menyangkut begitu banyak aspek kehidupan seperti kekayaan, politik, karier, keluarga, komunitas, gaya hidup, dll. Collins juga melihat bahwa tingkah laku manusia didorong oleh tujuan pemenuhan kepentingannya

sendiri, hanya saja dorongan itu bukan semata-mata rasional melainkan juga emosional. Untuk memahami konflik antarlapisan sosial, perlu diperhatikan perbedaan penguasaan atas sumber-sumber daya yang ada di tingkat pelaku-pelakunya. Pelaku dengan sumber daya banyak dapat mengubah kendala-kendala bagi pencapaian tujuannya, dan sebaliknya bagi yang terbatas sumber dayanya. Dalam situasi ketimpangan, pemilik sumber daya yang banyak memang cenderung mengeksploitasi mereka yang kurang, atau memaksakan gagasan mereka kepada yang lebih lemah. Namun Collins mengingatkan bahwa eksploitasi atau pemaksaan gagasan demikian belum tentu dilandasi hitung-hitungan untung-rugi yang cermat terhadap hubungan yang timpang itu, karena seringkali pelaku lebih terdorong untuk mengejar kepentingannya sendiri. Aspek lain yang dianggap penting adalah pengalaman individu. Mereka yang terbiasa memerintah akan berbeda sikap dan tingkah lakunya dari yang biasa diperintah. Hal ini penting untuk memahami sikap pekerja terhadap organisasi. Pekerja sebagai pihak yang lebih sering diperintah daripada memerintah, akan menjadi orang-orang yang patuh dan fatalistik: ada kecenderungan untuk lebih mementingkan

imbalan ekstrinsik dan menjauh dari cita-cita organisasi (pekerja).

Organisasi. Organisasi adalah pengaturan kegiatan kolektif. Ada organisasi yang formal dan ada organisasi komuniti. Organisasi formal biasanya bertujuan khusus dan menggunakan cara-cara yang khusus pula serta relatif baku untuk mencapai tujuannya. Orientasi atau arah organisasi yang formal ke tujuan yang khusus itu, akan membatasi hubungan di kalangan anggotanya sebagai hubungan di antara peranan-peranan yang tertentu saja. Pengorganisasian demikian tentu berbeda dari pengorganisasian komuniti yang cakupan hubungan antarwarganya lebih luas, meliputi banyak aspek kehidupan mereka. Dalam kenyataan kehidupan sosial, kedua jenis organisasi ini dapat memiliki bagian yang sifatnya berbeda. Misalnya, dalam suatu komuniti bisa terdapat organisasi yang resmi (kelompok pengajian, kelompok arisan, dll.), dan sebaliknya, dalam suatu organisasi formal berkembang ikatan-ikatan primer seperti persahabatan yang menyerupai kekerabatan, dan seterusnya.

Pengorganisasian kerap membutuhkan dukungan penggalangan identitas tertentu. Terlebih lagi bila pengorganisasian itu meliputi populasi yang

beragam identitasnya, maka upaya mencari kesamaan di balik keragaman mutlak diperlukan. Seorang ahli sosiologi, R. Dahrendorf (1959) mengajukan konsep "kelompok semu" untuk merujuk ke suatu golongan luas yang memiliki suatu kesamaan dan karenanya berpotensi untuk digalang dan bahkan diorganisasi menjadi suatu kelompok kepentingan. Salah satu cara untuk mengubah "kelompok semu" menjadi "kelompok kepentingan" adalah dengan membangun identitas bersama. Sumber-sumber identitas bersama itu cukup beragam, termasuk komunitas dan kelas atau golongan sosial.

Demikianlah keempat konsep ini akan digunakan untuk membahas kehidupan buruh dalam komunitas Rungkut Lor dan menjajaki kemungkinan melakukan pengorganisasian buruh berbasis komunitas.

Rungkut Lor: dari Pertanian ke Industri

Kisah tentang asal-mula daerah Rungkut diawali oleh kedatangan seorang pedagang Persia bernama Zarkasyi yang berlayar dari Banten ke tanah Jawa, bersama putranya yang bernama Tholabuddin. Setibanya di Jawa Timur, Tholabuddin muda

dititipkan oleh ayahnya ke sebuah pesantren milik Sunan Ampel untuk mempelajari ilmu agama. Sekitar tahun 1200 H, Tholabuddin dewasa yang sakti dan kuat mendapat amanat dari Sunan Ampel untuk membuka daerah Rungkut dengan cara melakukan syiar Islam.

Di masa itu Rungkut merupakan daerah yang dipenuhi oleh rawa, semak belukar dan alang-alang yang rapat (rungskut) dan tinggi seperti hutan. Tholabuddin *membabad* (membuka) daerah Rungkut dari bagian Selatan kemudian ke arah Barat dan Timur. Upayanya gagal terus, dan baru berhasil ketika ia sampai ke bagian Utara. Dari sanalah nama daerah ini sekarang, Rungkut Lor. Tahun 1209 H, Tholabuddin memulai syiar Islamnya dari daerah Rungkut Lor dengan membangun sebuah rumah dan sumur. Syiar Islam dilakukan secara damai di tengah masyarakat yang saat itu telah menganut ajaran Budha. Sisa-sisa masa Budha tampak dari praktik membuat sesajen dengan kembang tujuh rupa, yang bertahan konon sampai tahun 1950-an. Di kemudian hari, rumah Tholabuddin kemudian dibangun kembali oleh warga menjadi mesjid Tholabuddin yang berornamen indah di sisi Utara jalan Rungkut Lor; sedangkan sumurnya sempat diper-

cayai merupakan sumber penyembuhan penyakit. Kepercayaan ini lambat laun memudar sejalan dengan perkembangan industri yang juga mengubah banyak cara hidup masyarakat setempat. Sementara itu riwayat syiar Islam oleh Tholabuddin kerap dirujuk sebagai sumber identitas masyarakat Rungkut Lor sebagai masyarakat Islam yang 'fanatik'.²

Sebelum tahun 1960, daerah Rungkut merupakan daerah agraris yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam dan bekerja sebagai petani. Banyak warganya yang pandai menjahit menjalankan usaha konveksi rumahan; hampir setiap rumah saat itu memiliki mesin jahit. Seorang pengumpul mendatangi setiap rumah mengambil hasilnya untuk dijual di pasar. Para penjahit dapat juga langsung menjual produk mereka di pasar atau warung mereka masing-masing. Ketika itu sudah ada pasar Sopotnyono, meski masih sedikit jumlah kiosnya yang dibangun secara mandiri oleh masyarakat Rungkut.

Tahun 1960-1970 wilayah persawahan Rungkut berangsur-angsur dibeli oleh para investor untuk dijadikan

tanah landasan pembangunan industri. Industri awal yang berdiri saat itu adalah PT Kedaung (1970; kini bernama Kedaung Group), PT Lotus (1973; sebuah pabrik tekstil), dan PT Horison Syntex (1975; sekarang PT Star In). Pembangunan wilayah Rungkut sebagai kawasan industri membuat Rungkut mulai diperhatikan oleh pemerintah. Pemerintah mulai menyalurkan dana untuk pembangunan sarana dan prasarana kampung seperti MCK, listrik, saluran air, dan jalan. Secara bertahap, tanah landasan tidak hanya dibeli oleh investor untuk pembangunan industri awal namun juga untuk kawasan industri SIER (Surabaya Industrial Estate Rungkut) dan perumahan. Saat itu harga jual tanah/sawah per *gogolan* (3/4 ha atau 4 *ancer*) sekitar Rp 300.000,- sampai Rp 400.000,-, sedangkan harga tanah yang berada di pinggir jalan bisa mencapai Rp. 2.000.000 per m². Luasan lahan sawah yang terjual di daerah Rungkut Lor di masa itu mencapai 11.000 m².

Kemunculan industri, disusul oleh perkembangan perumahan kota di daerah Rungkut, mengubah mata pencaharian dan beberapa segi

² Istilah 'Islam fanatik' itu digunakan oleh beberapa warga, termasuk ulama setempat, dan penduduk Surabaya di luar Rungkut yang dijumpai dalam waktu penelitian. Sayangnya kami tak dapat menemukan sumber-sumber tertulis mengenai perkembangan Islam di daerah ini untuk mengkonfirmasi pernyataan-pernyataan demikian.

budaya atau cara hidup masyarakat Rungkut. Dari sisi mata pencaharian, warga tidak dapat lagi bertani karena tanah persawahan telah beralih ke tangan investor industri dan perumahan. Usaha konveksi pun tidak lagi menguntungkan ketika pakaian jadi telah diproduksi secara massal oleh pabrik. Namun bekerja di pabrik juga bukan pilihan. Beberapa warga yang mencobanya menemukan bahwa waktu kerja yang panjang dengan sedikit saja waktu istirahat — terutama untuk shalat — dirasakan tidak sesuai bagi mereka. Banyak warga lalu mengandalkan sumber nafkah mereka dari usaha pondokan,³ yang berkembang menyambut kedatangan para pekerja industri dari berbagai daerah.

Awalnya, tarif pondokan yang satu dengan yang lain seragam. Kamar pondokan yang disewakan berbentuk bedeng dari kayu dan bambu. Lama-kelamaan pemilik pondokan membangun kamar menjadi bangunan permanen menggunakan batu, semen, dan keramik. Peningkatan mutu kamar pondokan meningkatkan pula

tarifnya, dan terjadilah persaingan harga kamar pondokan. Tidak hanya kamar pondokan, *pontèn*⁴ (sarana MCK) umum pun disewakan. Setiap kebutuhan pendatang disediakan oleh pemilik pondokan asalkan dapat membayar sesuai harga yang ditetapkan. Tarif penggunaan sarana umum seperti *ponten* tadi, ditentukan oleh rapat RT. Sedangkan tarif air PDAM ditentukan oleh masing-masing pelanggan PDAM tersebut. Para perempuan yang semula bekerja sebagai penjahit kini menerima 'penitipan anak' bagi buruh perempuan yang harus bekerja dan meninggalkan anak.

Perubahan yang kasat mata antara lain dalam cara berpakaian. Para perempuan tidak lagi mengenakan *sewe* (kain) sebagai pakaian sehari-hari, dan menanggalkan kerudung yang dilapisi *remong* (berbentuk seperti mukena). Kini mereka berce-lana atau bergaun selutut dengan blus kaos, seperti pakaian yang dikenakan oleh para perempuan muda pendatang yang bekerja sebagai buruh. Pengajian rutin setiap minggu di

3 Penduduk setempat, baik pemilik maupun penyewa pondokan, lebih kerap terdengar menggunakan istilah 'kos-kosan' atau 'indekosan' (dari *in de kost* [Belanda] yang berarti 'tinggal di tempat sewaan'). Demikianlah, penyewa yang rata-rata berusia muda suka disebut 'anak kosan'.

4 *Pontèn* adalah istilah yang dipakai penduduk setempat, mungkin mengambil dari kata bahasa Belanda *fontein* (pancuran air). Dulu pemerintah Hindia Belanda sempat melakukan pembangunan fasilitas umum di permukiman penduduk pribumi di kota-kota (kampung verbetering), yang mencakup jaringan air bersih yang berujung di pancuran-pancuran air setempat pada tahun 1920-1930 an (bd. Dick 2002:161-179).

setiap gang bergeser menjadi setiap bulan dan hanya dilakukan per RT/RW. Pengajian rutin tiap minggu hanya milik kelompok jemaah tertentu atau dilakukan di rumah tokoh agama. Meski begitu, dalam percakapan dengan para ulama setempat, masih disebutkan bahwa ciri komuniti Rungkut Lor adalah komuniti Islam yang 'fanatik'. Mungkin ini adalah suatu bentuk pernyataan "identitas defensif" yang merujuk ke "ingatan kolektif" tentang aktifnya syiar Islam di sini. Menurut Castells, identitas defensif merupakan gejala reaksi komuniti lokal terhadap serbuan-serbuan orang, barang, dan gagasan dari luar yang tidak mampu mereka kendalikan (1997:60-64).

Dikotomi Warga Asli-(Buruh) Pendatang di Komuniti dan Pabrik

Asal-usul dan pembedaan kewargaan secara sosial. Penjualan tanah penduduk asli Rungkut Lor kepada industri sekitar tiga dasawarsa yang lalu disertai oleh kesepakatan melalui *rembug desa* antara warga dengan industri, yang meliputi kesediaan industri untuk memprioritaskan warga lokal sebagai tenaga kerja. Namun ketika itu hanya sedikit warga asli yang menanggapi tawaran menjadi

tenaga kerja di pabrik, karena hasil penjualan tanah membuat kemampuan ekonomi rumah tangga penduduk setempat meningkat. Lurah Rungkut kemudian mencari tenaga kerja dari daerah di sekitar Jawa Timur untuk menjadi tenaga kerja di kawasan industri Rungkut. Para pencari kerja dari kota-kota di Jawa Timur dan Madura berdatangan ke Rungkut. Beberapa di antaranya pendatang dari Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan NTT. Kedatangan buruh dari luar Rungkut memunculkan kategori warga asli Rungkut dan pendatang.

Ada beberapa pengertian yang diberikan masyarakat terhadap istilah warga asli dan pendatang. Mengenai kategori warga asli, dapat berarti:

- Keturunan atau kerabat dari warga asli Rungkut lainnya. Sebelum industri berdiri di Rungkut dan menarik pendatang ke sini, perkawinan antarkerabat dekat (antar-sepupu derajat pertama) cukup lazim. Konon sebabnya antara lain karena dulu penduduk Rungkut bermukim dalam kelompok-kelompok rumah yang penghuninya berkerabat dekat, dan jarak antarkelompok rumah cukup jauh, sehingga perjodohan pun terbatas pada kalangan terdekat. Kini, bertolak dari kriteria ini, pendatang yang masih mempunyai hubungan

kerabat dengan orang asli Rungkut akan dimasukkan ke dalam lingkaran warga asli.

- Warga yang lahir dan menetap di Rungkut. Pengakuan ini termasuk bagi mereka yang orang tuanya berasal dari luar Rungkut, namun sudah cukup lama tinggal di sini.

Sedangkan pendatang dibedakan menjadi pendatang menetap dan pendatang musiman. Pendatang menetap adalah pendatang yang mempunyai tanah dan rumah di Rungkut. Sedangkan pendatang musiman adalah pendatang yang tinggal di pondokan (milik penduduk asli) karena tidak memiliki tanah dan rumah. Meskipun tidak punya tanah dan rumah, pendatang musiman banyak yang telah tinggal di pondokan-pondokan di Rungkut Lor lebih dari 10 tahun.

Dari golongan pendatang musiman ini bagian terbesar adalah para buruh yang bekerja di kawasan SIER. Ciri demografis sosial yang menonjol adalah bahwa kebanyakan dari mereka berusia muda, antara 17-30 tahun, lajang, pendatang dari desa, dan tinggal di kamar-kamar pondokan. Ada pula buruh yang sudah menikah dan tinggal bersama keluarganya di Rungkut. Di antara pasangan semacam ini, ada yang salah satunya

bekerja sebagai buruh industri, ada pula yang keduanya bekerja. Di kalangan penduduk asli, khususnya para orang tua, terdapat pandangan stereotipik bahwa buruh pendatang muda itu adalah golongan yang kurang bertatakrama dan/atau beribadat. Penilaian demikian dikaitkan misalnya dengan cara berpakaian yang serba terbuka atau ketat khususnya pada perempuan pendatang, pada pola pergaulan antarjenis kelamin yang konon relatif bebas (misalnya saling bertamu di malam hari di kamar-kamar pondokan).

Di antara warga asli dan pendatang, terutama pendatang musiman, terdapat semacam batas yang tak kasat mata namun nyata akibatnya dalam berbagai aspek kehidupan sosial setempat.

Pembedaan kewargaan dan akses ke sumber daya lokal. Dari kalangan warga asli dan pendatang menetap muncul orang-orang yang disebut sebagai tokoh agama (Islam), tokoh masyarakat (para penggiat atau pengurus di institusi setempat dari RT, RW, sampai ke Kelurahan), dan *sese-puh*. *Sese-puh* merupakan sebutan bagi orang yang dituakan dan dihormati berkat pengalamannya baik sebagai tokoh masyarakat maupun tokoh

agama. Dari kalangan pendatang menetap ada yang menjadi tokoh masyarakat karena sempat menjadi pengurus di tingkat RT/RW/Kelurahan; ada pula yang menjadi tokoh agama berkat kontribusinya bagi kehidupan beragama di Rungkut, seperti membangun masjid atau musholla atau memimpin pengajian berjamaah secara rutin di rumahnya. Demikianlah pengaruh warga asli dalam kegiatan keagamaan mulai tersaingi oleh pendatang menetap. Tetapi masih banyak ruang bagi warga asli untuk mengukuhkan posisinya dalam kehidupan komunitas, dengan membangun jaringan kekerabatan dalam kepengurusan pasar, kegiatan komunitas, maupun kegiatan partai.

Jaringan kekerabatan penting untuk mempertahankan kedudukan warga asli dalam kepengurusan pasar, karena pasar merupakan sumber penghasilan yang penting bagi mereka. Telah disebutkan bahwa pasar ini diawali oleh penduduk setempat yang membangun kios-kios di sana berdikit-dikit; karenanya orang Rungkut selalu menyebutnya sebagai "pasar rakyat". Kemudian pasar diresmikan pada tahun 1982 oleh pemerintah, dan sejak itu pemerintahlah yang membangunnya. Harga kios pun meningkat pesat, kini mencapai jutaan rupiah. Pendapatan para

pengurus pasar diambil dari SHU (Sisa Hasil Usaha), di antaranya dari pendapatan parkir yang mencapai 40 juta rupiah. Selain digunakan untuk mengupah pengurus pasar, pendapatan pasar dalam bentuk SHU didistribusikan untuk kegiatan keagamaan (30%), fakir miskin/yatim-piatu dan beasiswa (25%), untuk pengembangan pasar (25%), dan untuk pengembangan lingkungan (20%) yang dikelola setiap triwulan. Dengan demikian, pasar memang merupakan sumber daya yang penting bagi komunitas Rungkut Lor.

Selain kepengurusan pasar, warga asli juga diprioritaskan sebagai pengurus kampung. Perbedaan perlakuan warga asli terhadap pendatang ini tetap ada meski tidak diakui oleh warga asli. Dalam pemilihan ketua RT/RW, hanya pendatang menetap dan warga asli yang berhak menjadi kandidat ketua RT/RW, sedangkan bagi warga pendatang musiman hanya tersedia 'ruang' tipis untuk menjadi pengurus kampung, yaitu bila tidak ada lagi calon dari kalangan warga asli atau pendatang menetap, jadi sebagai calon cadangan.

Hak istimewa (*privilege*) warga asli memang bersumber dari status sebagai keturunan orang-orang yang jauh lebih lama atau "sejak awal" telah

menetap di Rungkut, sehingga keturunannya dipastikan lebih mengetahui situasi daerah dan masyarakat setempat dibandingkan pendatang, meski telah menetap lebih dari 10 tahun di Rungkut. Anggapan ini mencerminkan suatu bentuk "identitas defensif" (Castells, 1997), "ingatan kolektif" warga asli dianggap lebih sah karena dibangun oleh pengalaman panjang yang diwariskan turun temurun; sedangkan pendatang, apalagi pendatang musiman, hanya tahu sebagian-sebagian saja.

Selanjutnya, jaringan kekerabatan yang dibangun oleh warga asli baik di kepengurusan pasar maupun di kepengurusan RT/RW menjadi 'motor' bagi aktivitas mereka di kepengurusan partai. Hubungan antarwarga asli Rungkut terlihat dalam aktivitas Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPC Rungkut. Rungkut merupakan basis PKB dan mayoritas pengurusnya adalah penduduk asli Rungkut. Mereka memanfaatkan kekuatannya untuk mempengaruhi warga pendatang agar mendukung para calon legislatif atau kepala daerah usulan PKB. Beberapa *sesepuh* maupun tokoh menggunakan pengaruhnya untuk memperoleh dukungan massa sebagai calon legislatif daerah tahun 2004. Pengaruh mereka sangat kuat sehingga hampir tidak ada partai lain yang

mampu merebut atau sekedar menandingi kekuatan massa PKB.

Dengan mempertahankan jaringan kekerabatan di kepengurusan RT/RW maka akses terhadap bantuan pemerintah pun mudah diprioritaskan bagi warga asli. Bantuan pemerintah tersebut berupa raskin (beras miskin), kartu JPS (Jaring Pengaman Sosial) - sebuah kartu yang diperuntukkan bagi penduduk yang tak mampu membayar pelayanan kesehatan - dan bantuan sembako (sembilan bahan pokok). Resminya, yang berhak mendapatkan bantuan pemerintah adalah keluarga yang hanya mempunyai satu orang pencari nafkah dan memiliki banyak anak. Namun warga asli yang dapat menerima bantuan ternyata lebih luas, tidak terbatas pada yang memenuhi kriteria resmi itu.

Pembedaan kewargaan secara administratif. Terutama sejak pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan pengurusan KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau KIPEM (Kartu Penduduk Musiman) pada tahun 1995, akses terhadap bantuan pemerintah diprioritaskan bagi pemilik KTP Surabaya. KIPEM merupakan kartu tanda pengenal bagi penduduk pendatang musiman yang tidak memiliki tempat tinggal permanen di Surabaya. Untuk mengurus KIPEM, seorang pendatang

musiman harus membawa surat jalan dari daerah asal dan mendaftarkan sebagai penduduk baru di RT setempat. Setelah mendapat ijin RT/RW, pendatang musiman dapat mengurus KIPEM di kelurahan. Sedangkan KTP Surabaya penting dimiliki warga untuk dapat mengakses kartu JPS. Bagi pendatang yang mampu membeli tanah dan membangun rumah di Rungkut boleh memiliki KTP Surabaya, karena memiliki tempat tinggal menetap. Dari kalangan buruh yang bisa memiliki KTP Surabaya adalah para buruh perempuan Sampurna. Penghasilan mereka yang relatif besar memungkinkan mereka menyisihkan uang untuk membeli tanah dan membangun rumah di Rungkut. Namun lebih banyak buruh yang tidak mampu mengubah statusnya jadi penduduk tetap, dan karenanya administrasi kependudukan ini menguatkan dikotomi antara warga asli dan penduduk musiman.

Pembedaan kewargaan di pabrik. Dikotomi antara pendatang dengan warga asli tidak hanya 'hidup' di komunitas namun juga terbawa hingga ke pabrik. Sumbernya terletak pada saat pabrik mulai membatasi dan menolak warga asli Rungkut yang ingin bekerja di pabrik. Pembatasan dan penolakan itu dipicu oleh konflik

antara majikan-buruh atau mandor-buruh yang terjadi di pabrik, seperti kasus-kasus berikut ini.

Seorang warga asli yang menjadi buruh di sebuah pabrik menuntut pembayaran pesangon dari masa kerjanya yang telah berakhir sebagai buruh kontrak waktu tertentu (KKWT). Pabrik tidak memperpanjang kontraknya karena kinerjajanya dianggap buruk: ia hanya bekerja selama 4 (empat) hari dalam 1 (satu) minggu. Protes terhadap mandor dilakukannya di pabrik dan tempat tinggal mandor tersebut. Penyerangan tidak dilakukannya sendiri tetapi bersama sekelompok pemuda asli Rungkut.

Ketika terjadi PHK terhadap seorang buruh asli Rungkut yang menuntut pabrik untuk menyediakan waktu sholat. Kondisi pabrik tempat buruh tersebut bekerja tidak memberikan jam istirahat dan sholat karena setiap buruh bertanggungjawab pada mesin yang harus terus beroperasi. Saat protes kepada mandornya, buruh tersebut justru menuai PHK daripada persetujuan tuntutan. Protesnya tidak didukung oleh teman di pabrik karena mayoritas buruh yang bekerja di tempat itu adalah pendatang.

Seorang buruh asli Rungkut di-PHK karena melawan perintah mandornya di pabrik. Sebagai warga asli Rungkut ia merasa

tersinggung ketika ditegur oleh mandor karena kinerja yang buruk. Mandor yang memberi perintah kepada buruh tersebut dipukul dan terjadi perkelahian antara mandor dengan buruh.

Kasus-kasus seperti di atas rupanya lalu merupakan awal pencapan (*labeling*) buruh asli Rungkut sebagai 'pemberontak'. Memang mereka lebih berani melawan pabrik, dan terkadang merujuk cap demikian bagi diri mereka sendiri, karena merasa tidak takut kehilangan sumber penghidupan di kampung halamannya. Pengalaman bekerja di pabrik memberi kesan bagi warga asli bahwa pekerjaan di pabrik adalah pekerjaan rendah yang tidak bermartabat dan seringkali hanya dianggap sebagai pekerjaan sampingan. Sebagian warga asli yang tidak mau atau tidak diterima bekerja di pabrik membangun pondokan yang disewakan dengan harga 30 hingga 80 ribu per kamar. Sebagian lainnya berusaha membuka warung, menjadi pedagang keliling, atau pedagang di pasar.

Bersamaan dengan itu, berkembang anggapan pada warga asli bahwa pendatang lebih diterima oleh pabrik karena sifatnya yang 'penurut'. Asumsi ini juga dibenarkan oleh para buruh pendatang yang menegaskan alasan kedatangannya ke Rungkut

hanya untuk bekerja di pabrik. Sebenarnya stereotip "pendatang=penurut" itu memuat penilaian agak negatif. Ketika warga asli Rungkut ditolak bekerja di pabrik, permintaan terhadap buruh pendatang semakin besar. Hal ini semakin menguatkan perasaan negatif warga asli terhadap pendatang. Ketidaksukaan tersebut muncul dalam bentuk pencapan dan perlakuan negatif, seperti kasus-kasus berikut.

Buruh perempuan yang pulang larut setelah menyelesaikan giliran (*shift*) kerja siang/petang atau perempuan yang berangkat untuk bekerja pada shift malam, disebut sebagai perempuan tak bermartabat. Dikembangkanlah wacana "kepantasan" bagi buruh pendatang yang perempuan: tak lazim apabila perempuan masih berada di luar rumah setelah maghrib terutama di atas jam 9 malam. Tuduhan tersebut menjadi senjata untuk menyerang pendatang yang tidak mengadopsi norma masyarakat setempat. Stigma negatif juga dilekatkan pada buruh perempuan yang sekali waktu ikut *cangkrukan* (nongkrong) di warung dengan kelompok laki-laki.

Para perempuan pekerja pabrik yang tinggal di wilayah Rungkut sering diganggu oleh pemuda asli yang sedang *cangkrukan* sambil berjudi atau mabuk.

Buruh pendatang perempuan pemondok juga menjadi sasaran pengusiran pemilik pon-

dokan apabila buruh perempuan tersebut terlihat dengan pria di atas jam sembilan malam. Anehnya, bukan pria yang diusir oleh pemilik pondokan tetapi perempuanlah yang sering menjadi korban pengusiran pemilik pondokan. Pengusiran tidak hanya dilakukan secara langsung namun juga secara halus melalui rumor yang dilontarkan oleh pemilik pondokan di antara warga asli atau pendatang yang telah menetap.

Buruh pendatang perempuan juga sering dijadikan sasaran gunjingan bila dinilai berperilaku menyimpang dari kebiasaan masyarakat. Tindakan saling siram di tempat pondokan saat ulang tahun merupakan salah satu perilaku yang dilihat menyimpang dari norma masyarakat Rungkut, sehingga dapat dijadikan alasan untuk melakukan pengusiran penghuni pondokan.

Tidak semua tindakan buruh pendatang musiman yang terkategori sebagai penyimpangan norma cukup diselesaikan oleh pemilik pondokan. Apabila perilaku menyimpang dianggap cukup ekstrem, maka sanksi dijatuhkan kepada pelakunya atas nama "masyarakat setempat".

Berpacaran di pondokan hingga larut malam dianggap perbuatan yang patut dihukum warga asli menganggap diri mereka berhak 'menggerebek' atau menangkap basah pendatang musiman tersebut. Korban akan diminta membayar

uang sebesar 50 ribu rupiah kepada penangkap basah kemudian membayar uang dengan jumlah yang sama kepada pengurus RT/RW dan pergi dari wilayah tersebut. Pemuda asli terlibat sekaligus menjadi aktor utama penggrebegan tersebut. Meskipun warga asli juga pernah menjadi korban penggrebegan, mereka tidak dijatuhi sanksi berupa uang dan tidak diusir dari tempat tinggal. Mereka hanya diminta untuk membersihkan selokan sebagai bentuk sanksi sosial. Dalam hal ini terjadi perbedaan bentuk sanksi bagi pendatang dan warga asli yang menegaskan dikotomi diantara keduanya.

Penggerebegan tidak hanya dilakukan terhadap perilaku yang menyimpang dari norma masyarakat, tetapi juga berlaku bagi ketidakpatuhan terhadap sistem pemerintahan lokal yang mewajibkan pembuatan KIPEM.

Razia KIPEM dilakukan oleh pengurus RT/RW dan kadangkala dibantu oleh aparat kepolisian. Pengurus RT/RW akan terkena wajib lapor dan mendapat *briefing* dari kepolisian selama satu bulan bila didapati salah satu warga musimannya menjadi target operasi kepolisian. Meskipun kegiatan ini dilakukan di setiap gang, namun tidak terjadwal dan tidak dilakukan setiap bulan. Biasanya dilakukan malam atau dini hari saat penghuni pondokan tidur. Bagi pendatang musiman yang tertangkap saat razia KIPEM diwajibkan mengurus KIPEM saat itu juga.

Warga asli pun memanfaatkan situasi ini dengan meneguhkan aturan masyarakat seperti: (1) jam malam untuk kunjungan maupun untuk berada di luar pondokan; (2) menegaskan kewajiban iuran (iuran sampah dan pengganti ketidakikutsertaan dalam kerja bakti) bagi penghuni pondokan; dan (3) aturan-aturan lain yang bertujuan untuk menjaga ketenangan kampung. Namun pengecualian sanksi masyarakat berlaku bila pelanggaran dilakukan oleh pemuda asli yang mabuk atau perkelahian antar gang. Aparat RT/RW setempat justru tidak mampu menindak pelanggaran tersebut. Untuk mengatasi persoalan dengan sesama warga asli, biasanya seorang *sesepuh* Rungkutlah yang digunakan sebagai mediator penyelesaian konflik.

Sejak buruh asli Rungkut ditolak masuk pabrik maka pemuda asli banyak yang menganggur atau merantau ke kota atau pulau lain seperti Jakarta atau Sulawesi. Sebagian pemuda asli yang menganggur terjerumus dalam aktivitas kenakalan sekaligus kejahatan. Perkelahian antar gang dan antar kelompok pemuda asli selalu terjadi dengan merusak rumah penduduk atau luka serius yang dialami tidak hanya oleh pelaku namun juga oleh masyarakat setempat. Selain berkelahi mereka juga mencuri barang milik penghuni pondokan.

Beberapa tokoh masyarakat — diantaranya bekerja sebagai tenaga keamanan pabrik — yang merasa terganggu dengan aksi pemuda asli tersebut menginisiasi pembentukan organisasi P2R (Paguyuban Pemuda Rungkut) yang bertujuan untuk menciptakan kegiatan bagi pemuda asli yang menganggur tanpa harus mewajibkan mereka terlibat dalam Karang Taruna. Para pemuda yang tergabung dalam P2R dianggap 'nakal' oleh pemuda asli yang tergabung dalam Karang Taruna. Mereka yang tergabung dalam Karang Taruna umumnya masih berada dalam usia sekolah dan tidak bersedia bergabung dengan pemuda asli yang dianggap 'nakal'. Begitu pula sebaliknya.

Berdirinya P2R berhasil mengumpulkan para pemuda asli yang dianggap 'nakal' dalam kegiatan bersama. Organisasi ini dimanfaatkan oleh warga sebagai tenaga keamanan saat perayaan hari besar keagamaan. Mereka pun pernah disewa sebagai tenaga keamanan saat pabrik mengadakan acara. Salah satu pengguna jasanya adalah Maspion. Bahkan beberapa anggota P2R mendapatkan pekerjaan sebagai tenaga keamanan di pabrik maupun perumahan. Berdirinya P2R telah berhasil mengurangi kenakalan dan kejahatan pemuda. Wilayah Rungkut Lor yang semula

menjadi target operasi polisi nomor satu berangsur-angsur berubah menjadi wilayah yang aman. Namun bagi buruh yang tinggal di Rungkut Lor, P2R memaksa mereka mengeluarkan uang keamanan di luar uang keamanan kampung untuk menjaga barang mereka saat pulang kampung.

Siasat Buruh Sehari-hari. Sejauh ini kita lebih menyoroti kepentingan pihak warga asli. Namun dikotomi warga asli dan pendatang juga memperlihatkan kepentingan yang dimiliki oleh pendatang. Buruh yang tinggal di komunitas Rungkut Lor lebih banyak terdiri dari warga pendatang musiman daripada warga pendatang menetap. Dalam kehidupan sosialnya, buruh memilih kelompok yang homogen atau yang senasib dengan dirinya, dan kriteria yang lazim adalah kesamaan daerah asal dan/atau kesamaan tempat kerja.

- **Kelompok yang homogen** yang terdiri atas sesama buruh dapat ditemui dalam bentuk informal seperti kelompok *cangkrukan* dan dalam bentuk formal berupa kelompok pengajian. Buruh bisa mempunyai banyak kelompok pengajian yang dibentuknya sendiri bersama teman sesama pendatang. Mereka yakin kelompok pengajian tidak akan men-

jerumuskan mereka sekaligus bisa memperdalam ilmu agama. Sedangkan kelompok *cangkrukan* terbentuk dengan sendirinya berdasarkan kedekatan tempat tinggal. Melalui kelompok ini buruh bertukar informasi tentang lowongan kerja bila kebetulan tengah menganggur. Di sini mereka juga bisa mendapatkan kredit barang murah atau reparasi gratis untuk barang elektronik.

- **Kegiatan berbiaya murah** dan tidak mengganggu jam kerja dan jam istirahat. Penghindaran kegiatan dengan warga asli di komunitas acap dilatari kesulitan biaya. Kegiatan bersama warga asli kerap melibatkan sejumlah besar orang, dan tuan rumah biasanya menyediakan konsumsi. Syarat sosial ini sulit dipenuhi buruh pendatang. Lain halnya dengan kegiatan sesama buruh pendatang: tuan rumah tidak perlu menyiapkan konsumsi dan tempat untuk banyak orang. Kegiatan sesama buruh biasanya tidak lebih dari 11 orang.
- **Bukan sumber pergunjangan** tetangga yang dapat mengancam posisinya di masyarakat. Kelompok kegiatan di komunitas tidak bisa dilepas dari efek negatif seperti pergunjangan/gossip. Beberapa buruh mengurungkan niat untuk rutin menghadiri kegiatan komunitas

karena takut menjadi bahan pergunjangan masyarakat. Misalnya, buruh enggan mengikuti pertemuan SB di komuniti jika tuan rumahnya telah mengetahui bahwa pondokannya digunakan untuk aktivitas SB, karena tuan rumah tidak segan untuk menegur atau mengusir penyewa jika tidak memperhatikan larangannya.

Demikianlah, buruh cenderung mengikuti kegiatan dalam komuniti lebih disebabkan oleh pertimbangan agar ia tidak terkucil dalam komuniti. Tetapi mereka akan menghindari kegiatan komuniti ketika ketegangan antar-lapisan sosial semakin kuat. Ini mirip yang pernah dikatakan Louis Wirth tentang mentalitas kaum minoritas. Dari pengalaman pribadi maupun wacana kalangan sendiri, buruh memiliki ketakutan sekaligus perasaan rendah diri apabila berhadapan dengan penduduk asli. Mereka sering menggunakan alasan capek akibat kerja di pabrik untuk menghindari kewajiban terlibat dalam kegiatan komuniti. Beberapa faktor bagi penghindaran ini adalah: (a) takut dituduh mengemis atau minta makan atau belas-kasih orang asli; (b) buruh tidak mampu membayar iuran kegiatan komuniti karena prioritas pemenuhan kebutuhan lainnya; (c) takut menghadapi pelecehan seperti dipergunjingkan

oleh warga asli yang mengikuti kegiatan tersebut.

Industri dan Dikotomi Warga Rungkut Lor. Demikianlah kita lihat betapa kemunculan industri merupakan prakondisi bagi dikotomi antara warga asli dan pendatang, dan akhirnya turut menguatkannya. Dikotomi yang terjadi di Rungkut Lor itu meruntuhkan asumsi awal kami bahwa di kawasan industri yang buruhnya relatif homogen dari segi etnis, akan ada hubungan sosial yang lebih baik antara pribumi dan pendatang yang berasal dari 'daerah budaya' yang sama. Namun data mengukuhkan teori-teori etnisitas, bahwa identitas etnis dapat mengendur dan mengecut. Di Rungkut Lor, di kalangan sesama orang Jawa Timur, kejawatimuran tidak lagi penting, dan rujukan penting bagi identitas dalam interaksi mereka adalah daerah asal. Perbedaan ini lalu menjadi mantap karena berlapis-lapis dimensi yang dirujuk: asal-usul (wilayah dan sosial), sumber penghidupan, cara hidup, dan kepentingan. Perbedaan juga dimantapkan oleh sistem administrasi kependudukan. Yang lebih penting adalah temuan bahwa dikotomi identitas asli-pendatang ini juga posisional, karena mendudukan warga asli lebih tinggi daripada pendatang. Kita lihat bahwa dimensi ekonomi di sini

menjadi landasan pembedaan, tetapi digabung dan digunakan silih berganti dengan dimensi-dimensi lain: sosial, politik, dan budaya (termasuk agama).

Bagi warga asli, identitas utama para pendatang musiman itu adalah buruh. Buruh artinya penghasil uang, artinya konsumen potensial. Dalam kenyataannya, memang pendatang musiman hanya dianggap sebagai konsumen dari barang kebutuhan yang dijual oleh warga asli yang memiliki pondokan, warung, atau saluran PDAM. Memang sempat ada kasus istimewa, yakni ketika seorang pendatang musiman menjabat sebagai pengurus RT, warga asli menerima identitasnya sebagai pengurus RT. Namun demikian mereka tak pernah lupa menyebutkan identitasnya yang dominan, sebagai buruh.

Dengan demikian, dikotomi yang terjadi di komunitas telah memarginalkan pendatang musiman dengan identitas buruh. Sikap dan tingkah laku warga asli mirip dengan yang dikatakan Herbert Blumer (1961) tentang kompleks sikap golongan dominan, yaitu: (1) perasaan lebih unggul; (2) perasaan bahwa golongan yang lebih rendah, secara intrinsik adalah orang asing, orang lain (dalam kasus Rungkut Lor sebaliknya: penda-

tang atau orang lain adalah lebih rendah); (3) perasaan memiliki hak (*claim*) atas wilayah privilese dan keuntungan tertentu, dan (4) perasaan takut dan curiga (*jealousy*) bahwa golongan minoritas akan mengambil hak-hak istimewa golongan dominan. Namun kita bisa melihatnya dari sisi lain. Pembatasan akses bagi pendatang ke kepengurusan RT/RW dan parpol, ke sumber-sumber daya penting lain, dan tindakan penegakan norma dengan landasan stereotip identitas tunggal pendatang sebagai buruh. Pendek kata, politik identitas warga asli adalah benteng pertahanan mereka terhadap perkembangan situasi materi dan sosial yang tidak dapat mereka kendalikan sendiri. "Keaslian" berikut segala privilese, dengan begitu, adalah identitas defensif.

Menggalang solidaritas bagi buruh di komunitas?

Paparan di atas menimbulkan bayangan suram bagi kemungkinan menggalang solidaritas buruh lintas sektoral ("rakyat pekerja") dalam komunitas. Memperjuangkan kepentingan buruh tidak terlepas dari identitas yang memunculkan perlawanan antarkelas maupun kerjasama intrakelas di pabrik, serta ketegangan dan

kerjasama intra maupun antarlapisan di komunitas. Perjuangan buruh merupakan perjuangan yang dilakukan setiap hari, setiap jam kerja, setiap bertemu dengan keluarga dan teman di komunitas — sebagai perjuangan antarlapisan sosial — maupun di pabrik — sebagai perjuangan antarkelas produksi. Telah ditunjukkan penomorduuan kedudukan buruh dalam struktur administrasi kependudukan dan struktur sosial di Rungkut Lor; tetapi pada saat-saat tertentu mereka diangkat ke kedudukan yang lebih tinggi, sebagai golongan ekonomi yang lebih mampu daripada rata-rata warga, yakni bila sedang ada keperluan penggalangan dana. Namun terlihat pula bahwa dinamika status buruh yang kontekstual ini merupakan hasil keputusan pihak warga asli, bukan hasil kesepakatan antara warga asli dengan buruh pendatang. Kasus Rungkut Lor ini menunjukkan betapa rentan kedudukan buruh dalam komunitas, dan temuan ini harus dikembalikan ke pertanyaan tentang kemungkinan mengorganisasi buruh bertolak dari komunitas.

Akan tetapi sesungguhnya ketegangan hubungan dalam komunitas telah mendorong upaya buruh untuk menyasiasi posisi diri mereka berhadapan dengan warga asli. Meskipun buruh pendatang memiliki halangan

untuk mengikuti kegiatan masyarakat, mereka selalu mengundang *sepeuh* atau tokoh masyarakat dalam perayaan pribadi/keluarga buruh. Undangan tersebut selain kebutuhan normatif juga menjadi kebutuhan untuk mendapatkan legitimasi bagi keberadaan mereka dalam komunitas setempat. Kepercayaan warga asli penting bagi pendatang untuk membantu di saat sulit, menjamin keamanan tempat tinggal, memahami situasi pekerjaan yang harus dihadapi buruh setiap hari sehingga dapat 'menembus' akses bantuan pemerintah.

'Siasat' tersebut, entah siapa buruh yang memulainya, berhasil menimbulkan empati dari warga asli terhadap mereka. Warga asli yang bekerja sebagai keamanan pabrik dan punya peluang untuk memasukkan orang ke dalam pabrik, orang tersebut akan memilih buruh pendatang. Pendatang dinilai sebagai orang yang meninggalkan keluarga dan kampung halaman untuk satu niat, yaitu bekerja. Niat ini dinilai sebagai jaminan bagi kualitas kerja mereka dalam proses produksi, yang akhirnya akan memberikan kredit pula bagi sang buruh keamanan — warga asli — yang memasukkannya. Di beberapa wilayah Rungkut Lor, buruh pendatang musiman yang telah tinggal lebih dari sepuluh tahun berhubungan cukup

